

Memperkuat Ruang Gerak & Keterlibatan Masyarakat Sipil **Sulawesi Tenggara**

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Provinsi Sultra
2025



Civic Engagement Alliance
2025



Potret Demografi, Ekonomi, dan Daya Dukung Ekologis

Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dulunya, Sultra adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulsel dengan Baubau sebagai ibukota kabupaten. Sultra menjadi wilayah provinsi sendiri sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1964 juncto UU Nomor 13 Tahun 1964. Ibukotanya adalah Kota Kendari dengan 17 kabupaten/kota di Sultra. Beberapa kabupaten yang terpisah dari pulau Sulawesi diantaranya Buton di Pulau Buton, Wakatobi yang terbagi beberapa pulau (Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko), dll.¹

Provinsi Sultra terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis, Sultra terletak di bagian selatan garis khatulistiwa serta mempunyai wilayah daratan seluas 18.140 km² dan perairan laut seluas 110.000 km².² Berbatasan lautan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di bagian selatan (Laut Flores), Provinsi Maluku di timur (Laut Banda), dan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di bagian barat (Laut Teluk Bone).

Sultra merupakan daerah perkebunan penghasil coklat, cengkeh, kopra, dan kelapa sawit di daerah Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Konawe.³ Wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas ini juga mengandung berbagai hasil tambang yaitu aspal dan nikel. Selain itu, lahan pertanian cukup potensial serta berbagai hasil hutan berupa rotan dan damar.⁴

Jumlah penduduk Sultra dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yaitu 2,84 juta jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan Provinsi Sultra selama lima tahun terakhir sebesar 1,65 persen.⁵ Sementara itu, jumlah penduduk miskin sebesar 295,31 ribu orang per September 2025. Angka tersebut turun 9,12 ribu dibandingkan Maret 2025 dan turun 9,96 ribu orang dibandingkan September 2024.⁶ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra tahun 2025 mengalami peningkatan 0,63 poin (0,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 73,62 menjadi 74,25. Selama tahun 2020-2025, rata-rata IPM Sultra meningkat sebesar 0,73 persen per tahun.⁷

¹ Yuda Prinada, "Profil Provinsi Sulawesi Tenggara: Sejarah, Geografi, dan Peta", 29 November 2022, <https://tirto.id/profil-provinsi-sulawesi-tenggara-sejarah-geografi-dan-peta-gzcl>, diakses 4 Juni 2026

² Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, "Tentang Sulawesi Tenggara", <https://www.sultraprov.go.id/tentang/sejarah>, diakses 4 Juni 2026

³ Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Prov. Sultra, "Sejarah dan Letak Geografis", <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/profil/sejarah.html>, diakses 4 Juni 2026

⁴ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, "Tentang Sulawesi Tenggara", <https://www.sultraprov.go.id/tentang/sejarah>, diakses 4 Juni 2026

⁵ H. Atto Raidi, "SUPAS 2025: Penduduk Sultra Capai 2,84 Juta Jiwa", 08 Mei 2026, <https://rri.co.id/kendari/regional/2399588/supas-2025-penduduk-sultra-capai-284-juta-jiwa>, diakses 4 Juni 2026.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sultra, "Presentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 10,14 Persen", 5 Februari 2026, <https://sultra.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1348/persentase-penduduk-miskin-september-2025-turun-menjadi-10-14-per-sen.html>, diakses 4 Juni 2026.

⁷ Redaksi Kendari Kini, "Indeks Pembangunan Manusia di Sultra Alami Kenaikan", 10 November 2025, <https://kendarikini.com/10/11/2025/indeks-pembangunan-manusia-di-sultra-alami-kenaikan/>, diakses 4 Juni 2026.

Situasi ekonomi tersebut juga ditambah dengan data BPS yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sultra 5,65 persen pada triwulan III 2025. Meskipun situasi dianggap cukup baik secara



Gambar 1. Kemiskinan Tiga Daerah Penghasil Nikel di Sultra

makro, situasi itu tidak serta merta menggambarkan kesejahteraan rakyat Sultra. Apalagi pertumbuhan ekonomi Sultra masih terpicu oleh sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Masyarakat yang hidup di sekitar tambang dan industri nikel mengalami persoalan sosial, kerusakan lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan tradisional seperti pertanian dan perikanan. Ketimpangan ekonomi antar wilayah perkotaan dan pedesaan juga semakin tajam.⁸ Memang isu agraria dan lingkungan mendominasi, tetapi bukan berarti tidak ada isu lainnya. Dapat ditemukan beberapa isu terkait inklusi serta perlindungan perempuan dan anak.

Penilaian Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat

⁸ Risman Hermawan, "Pertumbuhan Ekonomi Sultra 5,65 Persen, Apakah Rakyatnya Sejahtera?", 10 November 2025, <https://kendariinfo.com/pertumbuhan-ekonomi-sultra-565-persen-apakah-rakyatnya-sejahtera/>, diakses 4 Juni 2026.

A hand-drawn map of Africa on a piece of white paper. The map is divided into several regions, each labeled with French text. The regions and their labels are:

- Top Left:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).
- Top Center:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).
- Top Right:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).
- Middle Left:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).
- Middle Center:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).
- Middle Right:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).
- Bottom Left:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).
- Bottom Center:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).
- Bottom Right:** "PAYS SAHARA" (labeled with a red star).

The map is decorated with numerous colorful sticky notes (yellow, green, blue, pink, orange) and red stars. The sticky notes contain handwritten text, likely names of countries or regions. The red stars are placed in various locations across the map.

menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sultra 5,65 persen pada triwulan III 2025. Meskipun situasi dianggap cukup baik secara makro, situasi itu tidak serta merta menggambarkan kesejahteraan rakyat Sultra. Apalagi pertumbuhan ekonomi Sultra masih terpicu oleh sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Masyarakat yang hidup di sekitar tambang dan industri nikel mengalami persoalan sosial, kerusakan lingkungan, dan hilangnya sumber penghidupan tradisional seperti pertanian dan perikanan. Ketimpangan ekonomi antar wilayah perkotaan dan pedesaan juga semakin tajam.⁹ Memang isu agraria dan lingkungan mendominasi, tetapi bukan berarti tidak ada isu lainnya. Dapat ditemukan beberapa isu terkait inklusi serta perlindungan perempuan dan anak.

Masyarakat sipil Sultra berkonsolidasi dengan CEA pada tanggal 12-13 Januari 2026 di Kendari. Konsolidasi diikuti oleh 21 orang yang berasal dari 14 organisasi. Pertemuan ini guna membincang situasi ruang gerak masyarakat sipil sekaligus keterlibatan publik di Sultra. Berangkat dari keresahan untuk merespons isu-isu dan gerak respons masyarakat sipil di Sultra.

⁹ Risman Hermawan, "Pertumbuhan Ekonomi Sultra 5,65 Persen, Apakah Rakyatnya Sejahtera?", 10 November 2025, <https://kendariinfo.com/pertumbuhan-ekonomi-sultra-565-persen-apakah-rakyatnya-sejahtera/> diakses 4 Juni 2026.

masih sering terjebak dalam pola kerja yang sektoral dan belum terkoneksi dengan kuat secara kelembagaan di tingkat regional. Konektivitas paling sulit terbangun oleh OMS yang bergerak di wilayah daratan dengan mereka yang bekerja di wilayah laut atau kepulauan.

Situasi terkini yang dihadapi masyarakat sipil adalah belasan Proyek Strategis Nasional (PSN) diinvestasikan di Sultra. Kondisi tersebut menambah situasi kerentanan bagi para aktivis saat berhadapan dengan kepentingan besar di wilayah konflik. Maka dari itu, muncul kebutuhan mendesak untuk membangun ruang temu masyarakat sipil lintas isu dan wilayah.

Catatan Kritis terhadap Ruang Sipil dan Keterlibatan di Sumbagsel

Penilaian, eksplorasi, dan refleksi berbasis CIVICA di Regio Sultra mengungkap gambaran tentang kondisi ruang sipil melalui tujuh dimensi yang saling terkait dan menopang keberadaan ruang sipil. Rangkuman dari refleksi terhadap tujuh dimensi dari blok Kondisi Ruang Sipil (Civic Space) dan Keterlibatan Publik (Civic Engagement) adalah sebagai berikut:

Dimensi Pengorganisasian Basis atau Komunitas

Pengorganisasian basis di Sultra menghadapi tantangan berupa stigma terhadap organisasi masyarakat sipil, keterbatasan sumber daya, lemahnya kaderisasi, serta belum berkembangnya metodologi pengorganisasian. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) distigma sebagai orang yang menakutkan atau kekiri-kirian, antek asing, dll. Untuk mengatasinya, organisasi membangun kepercayaan melalui kehadiran langsung di komunitas, keterlibatan dalam penyelesaian persoalan warga, membangun hubungan yang setara, dan strategi lainnya. Ketergantungan komunitas terhadap OMS pun masih ada, terutama dalam pengembangan jaringan lintas isu. Meskipun pintu masuk OMS berbasis program, pengorganisasian tetap berjalan saat OMS tidak menggunakan pendekatan program. Contohnya, Forum Kelompok Konstituen di Kendari yang melalui pendekatan ekonomi dan Komunitas di Konflik Toraburu yang memperjuangkan ruang hidupnya melalui model usaha alternatif.

Rekomendasi Prioritas

1. Meninjau dan menyesuaikan kembali metode dan pola-pola pengorganisasian basis yang bertumpu pada kekuatan basis yang bisa dikelola secara kolektif, termasuk memaknai lagi konsep “perluasan” di basis.

Dimensi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Sultra melakukan berbagai inisiatif pembelajaran dan penguatan kapasitas yang berjalan di tingkat organisasi maupun komunitas, seperti rumah baca, kelas Geographic Information System (GIS), dan ruang belajar jurnalistik. Dalam praktik advokasi, OMS memiliki kapasitas untuk penggunaan data-data yang diperoleh melalui riset lapangan. Data-data ini menjadi bekal untuk memperkuat posisi tawar, kampanye publik, dan intervensi kebijakan. Namun data-data tersebut belum saling terhubung satu sama lain sebagai data bersama. Pengetahuan terkait advokasi juga belum terkelola dalam sistem pengetahuan yang dapat diakses bersama sebagai ruang berbagi pengetahuan, termasuk pengetahuan perlindungan/keamanan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kapasitas dan pengetahuan yang telah dimiliki masyarakat sipil belum sepenuhnya terkelola sebagai sumber daya bersama untuk memperkuat advokasi dan gerakan lebih komprehensif.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun ruang pembelajaran advokasi bersama. Misalnya, dengan mengupas kembali pengetahuan advokasi terutama dalam merespons konteks yang terus berubah.
2. Menumbuhkan kembali spirit dan berbagai pendekatan advokasi di tiap-tiap OMS sesuai peran dan tanggungjawabnya.

Dimensi Konektivitas Masyarakat Sipil

Masing-masing OMS di Sultra memiliki informasi mengenai profil dan kepakaran. Hanya saja, belum ada sistem database bersama sehingga belum dapat diakses bersama. Padahal ragam kepakaran cukup banyak seperti GIS, pengorganisasian, jurnalistik, advokasi, paralegal, pendampingan sosial, hingga pendampingan hukum. Organisasi di Sultra juga dihadapkan dengan gap generasi, baik terkait pengalaman ataupun kesadaran nilai. Strategi untuk menjawab itu dilakukan dengan melibatkan orang muda di berbagai aktivitas dan saling bertukar keahlian seperti menjadi fasilitator atau pengelola media. Sementara komunikasi di tingkat nasional dan regional berjalan menyesuaikan kepentingan isu, proyek yang sama, dan terkadang berbasis kenyamanan dalam berkomunikasi. Meskipun terdapat individu memfasilitasi relasi antar organisasi untuk menjaga konektivitas, sayangnya belum terlembagakan.

Rekomendasi Prioritas

1. Menggunakan pendekatan multi perspektif dalam kerja-kerja OMS
2. Ruang temu lintas pihak/isu (dapat memanfaatkan momentum) untuk memetakan kepakaran atau peran masing-masing dalam memperkuat Masyarakat sipil di Sultra.

Dimensi Mobilisasi Sumberdaya

Mekanisme dana kolaboratif biasanya muncul melalui konsorsium untuk isu tertentu atau dukungan solidaritas merespons situasi kedaruratan seperti kriminalisasi dan kebencanaan. Masyarakat sipil mencoba mengupayakan diversifikasi sumber daya melalui iuran anggota, akses dana pemerintah, hingga pengembangan unit usaha ekonomi komunitas. Tantangannya tentu ada yaitu menjaga keberlanjutan. Perihal donor, akses semakin sulit karena akses donor langsung ke daerah-daerah semakin sempit. Negosiasi justru dilakukan melalui sub donor sehingga berdampak pada keleluasaan untuk pengalokasian. Hal serupa juga terjadi saat akses dana pemerintah yang harus menyesuaikan pagu anggaran dan program pemerintah. Pada akhirnya, mobilisasi sumber daya di wilayah ini belum berkelanjutan karena masih reaktif, ketidaklaksanaan mengelola, maupun akses terbatas.

Rekomendasi Prioritas

1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan praktik-praktik baik pengelolaan sumber daya yang berhasil dilakukan sebagai sumber pembelajaran bersama
2. Menemukanali metode sharing pembelajaran terkait mobilisasi sumber daya secara kolektif dan efektif (berbasis kebutuhan).

Dimensi Regulasi Pendukung

Di Sulawesi Tenggara terdapat berbagai regulasi pendukung, baik di level provinsi atau kabupaten/kota. Contohnya, perda Pengelolaan DAS, perda terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, serta perda provinsi tentang pencegahan dan penanganan KS. Ada juga regulasi penghambat seperti KUHP, UU ITE, dan kebijakan PSN (Kolaka, Konawe, dan Konawe Utara). Masyarakat sipil turut terlibat intervensi kebijakan pula diantaranya pengarusutamaan gender, penetapan karst Matarombeo, desa wisata, dll. Berangkat dari pengalaman itu, tantangannya terdapat pada kebutuhan effort yang besar dan panjang serta politik pemerintah pusat. Tantangan lainnya adalah stigma penolakan (tolak tambang diidentikkan advokasi yang keras) dan keterhubungan kelompok masyarakat sipil lintas isu. Meskipun praktik konsolidasi gerakan cukup masif di Sultra, GEDSI belum terintegrasi cukup baik dalam gerakan masyarakat sipil.

Rekomendasi Prioritas

1. Perluasan konsolidasi gerakan advokasi yang juga bisa menjangkau kelompok Masyarakat sipil lintas isu, termasuk kelompok GEDSI
2. Mengintegrasikan dan transformasi GEDSI dalam gerakan advokasi.

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi

Advokasi kebijakan dan penanganan kasus berpotensi menjadi ruang konsolidasi gerakan lintas isu dan wilayah, seperti kebijakan tata ruang serta penanganan kasus tambang di Wawoni dan Kabaena. Advokasi juga mampu dikemas semenarik mungkin dengan berbasis lokalitas atau pengalaman masyarakat. Penggunaan narasi kampanye “Jangan ganti kelapa kami dengan tambang” menjadi salah satu contoh untuk mengajak masyarakat menjaga wilayahnya. Hal tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat sipil di Sultra tergolong kuat dalam advokasi advokasi. Namun, masih ada advokasi yang bersifat sektoral atau belum ada isu yang diletakkan sebagai isu bersama masyarakat sipil secara luas. Integrasi GEDSI juga belum berjalan maksimal, tetapi ada langkah mengupaya hal itu seperti membedah isu lingkungan dengan pendekatan GEDSI.

Rekomendasi Prioritas

1. Memastikan adanya kebijakan sekaligus ditegakkan untuk mendukung ruang gerak masyarakat sipil dan dapat menjadi perlindungan bagi kerja-kerja masyarakat sipil.

Dimensi Demokrasi Ekonomi

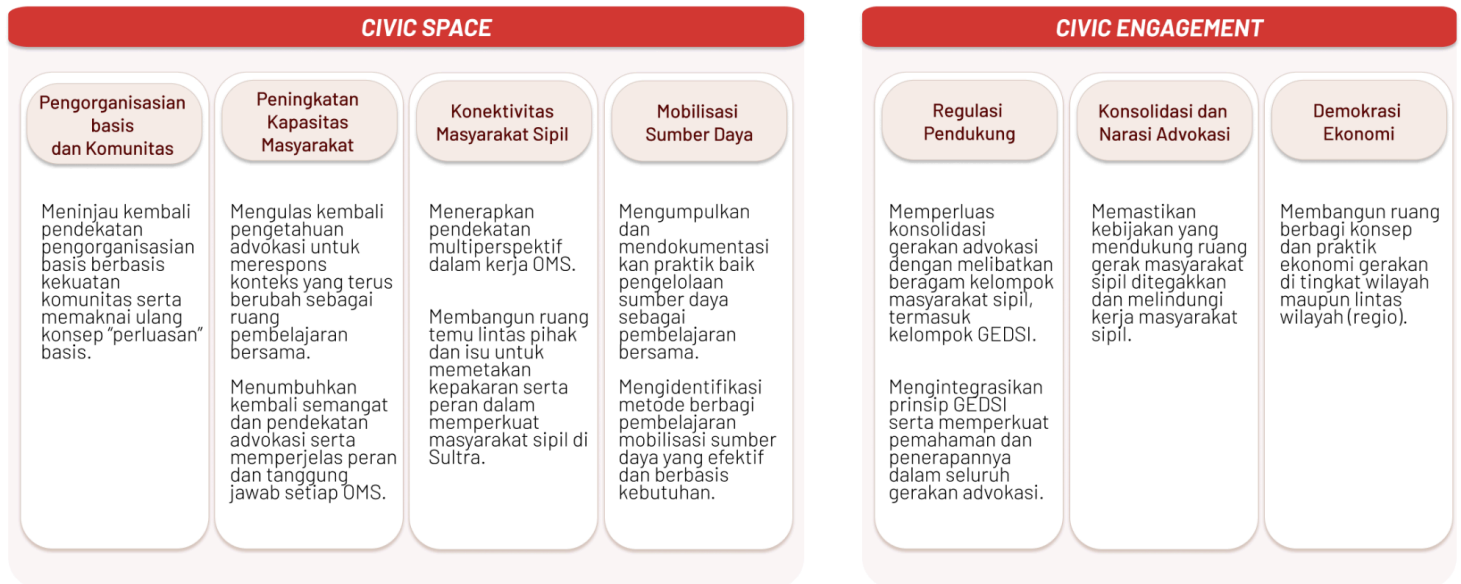
Inisiatif ekonomi berbasis komunitas telah mulai bermunculan, seperti pembentukan puluhan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPs), arisan sayur, daur ulang sampah, dan pengolahan sagu untuk kue. Penguatan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui menghubungkan dengan jejaring pasar dan akses konsumen lebih luas. Upaya memperkuat tata kelola ekonomi juga dilakukan melalui pembentukan koperasi dan kelompok usaha bersama. Dengan demikian, komunitas telah mempraktikkan upaya membangun ekonomi berbasis kekuatannya dan mulai mengembangkannya meskipun belum terbukti keberlanjutannya.

Rekomendasi Prioritas

1. Ruang pertukaran gagasan konsep dan praktik ekonomi di masing-masing wilayah dan lintas wilayah

Sintesis Penilaian CIVICA Sultra

Sesi refleksi terhadap ruang sipil dan keterlibatan publik menghasilkan rangkuman rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disajikan dalam diagram berikut.



Pengelolaan menuju mimpi "Ekosistem masyarakat sipil yang berdaya dan setara"

Gambar 3. Sintesis Penilaian CIVICA Sultra

Kesimpulan

Ruang sipil di Sultra menunjukkan dinamika yang aktif namun belum terkonsolidasi secara komprehensif. Gerakan masyarakat sipil masih memiliki beberapa tantangan. Masyarakat sipil yang bergerak lintas isu masih terfragmentasi. Keterhubungan antara wilayah daratan dan kepulauan masih lemah. Selain itu, integrasi perspektif GEDSI dalam advokasi belum berjalan maksimal. Konsolidasi yang dilakukan bersama CEA menjadi momentum penting untuk merefleksikan kekuatan sekaligus celah yang perlu diperkuat bersama.

Ke depan, penguatan masyarakat sipil di Sultra membutuhkan tiga pilar utama: pertama, konsolidasi jaringan lintas isu dan wilayah yang sistematis, bukan sekadar berbasis momentum atau kedekatan personal; kedua, pembangunan sistem pengetahuan bersama yang mencakup tetapi tidak terbatas pada basis data kepakaran OMS, dokumentasi praktik advokasi, dan sumber daya; ketiga, penguatan ekonomi berbasis komunitas menjadi narasi alternatif terhadap model pertumbuhan ekonomi ekstraktif. Masyarakat sipil akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan besar seperti PSN, maka konsolidasi yang lebih kokoh akan menjadi kekuatan. Dengan terbentuknya CEA Regio Sultra dapat menjadi simpul strategis untuk mendorong agenda-agenda bersama.